Policy

Kebijakan apa yang diharapkan :

Prosedur yang lebih efisien untuk rakyat :

- Perijinan (HR, HTR, Hutan Desa)
- Penjualan

Insentive :

- Keringanan pajak (PBB) pada hutan rakyat

Infrastruktur :

- Jalan ke hutan rakyat

Kebijakan alokasi Anggaran yang pro LCF :

- Untuk pembangunan kelembagaan dan peningkatan kapasitas
- Inventarisasi kayu dan pemetaan wilayah
- Biaya audit SVLK

Mempengaruhi Kebijakan Politik anggran :

- Green Procurement (mendekatkan pasar)

Bagaimana Caranya :

Mengungkap, mendokumentasikan dan mempromosikan praktek-praktek pengelolaan hutan pada CLF :

- Ekonomi (Kayu, Non Kayu, Ekonomi Wilayah)
- Sosial
- Ekologi
- PAD (hutan maupun industri)

Membangun organisasi petani pemilik/pengelola hutan rakyat (Asosiasi, Federasi…) cth. AKATRI

Merebut kekuasaan politik-politik lokal yang affirmatif

Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah agar mampu menghasilkan kebijakan-kebijakan yang pro CLF